

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN BOJONG  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN BOJONG**

JL. Proklamasi No. 45 Bojong – 52465

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2023 dapat disusun. Renja ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja Kecamatan Bojong Tahun 2023 dan hasil pelaksanaannya dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir Renja 2023 ini masih banyak kekurangan sehingga perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja dan guna peningkatan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal di waktu yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja ini. Semoga di tahun yang akan datang kinerja Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dapat ditingkatkan dalam memberikan pelayanan bagi perangkat daerah maupun masyarakat dalam mendukung pencapaian pembangunan di Kabupaten Tegal.

CAMAT BOJONG



**ENDRO NOR SUSILO, S.Sos. MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19731018 199303 1 002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	i
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Dasar Hukum</b> .....	2
<b>1.3. Maksud Tujuan</b> .....	3
<b>1.4. Sistematika</b> .....	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	5
<b>2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu</b> .....	5
<b>2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</b> .....	28
<b>2.3. Isu Penting</b> .....	32
<b>2.4. Review Rancangan Awal RKPD</b> .....	34
<b>2.5. Penelaahan Usulan Masyarakat</b> .....	51
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD .....	56
<b>3.1. Telaah Kebijakan Nasional</b> .....	56
<b>3.2. Tujuan Sasaran Renja PD</b> .....	58
<b>3.3. Program dan Kegiatan</b> .....	61
BAB IV. RENCANA KERJA.....	64
BAB V. PENUTUP .....	78

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Kecamatan Bojong Tahun 2021 ..... 6
Tabel 2.2	T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 ..... 14
Tabel 2.3	T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 29
Tabel 2.4	Data Perkembangan Desa Kec. Bojong Tahun 2021 ..... 30
Tabel 2.5	T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 ..... 36
Tabel 2.6	Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan TA 2023 ..... 53
Tabel 2.7	T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023 ..... 55
Tabel 3.1	Arah Kebijakan ..... 58
Tabel 3.2	Rincian Program dan Kegiatan Tahun 2023 ..... 62
Tabel 3.3	Rekapitulasi Anggaran Kegiatan ..... 63
Tabel 4.1	T-C.33 Rumusan Program dan Pendanaan Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2024 ..... 66

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja PD).

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan PD, memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja PD menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PD) ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) PD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Bojong memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati; menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, penerpaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan; menyelenggarakan koordinasi pembinaan pemerintahan desa; serta menyelenggarakan kesekretariatan/ ketatausahaan kecamatan.

Renja Kecamatan Bojong Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal. Kecamatan Bojong

menyusun Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bojong Tahun 2023 guna menyusun rencana kerja yang berupa program kerja dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bojong. Dengan demikian baik program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bojong dapat terintegrasi dan terlaksana dengan baik.

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Bojong Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022.
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
16. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024.

### **1.3. Maksud Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Bojong Tahun 2023 adalah melaksanakan proses penyusunan Renja berdasarkan data dan informasi wilayah Kabupaten Tegal dengan melibatkan para pemangku kepentingan agar diperoleh dokumen perencanaan yang aspiratif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bojong. Rencana Kerja Kecamatan Bojong Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan selama satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Bojong maupun semua lapisan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Renja Kecamatan Bojong merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Bojong pada tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja ini adalah:

1. Untuk menjabarkan Renstra Kecamatan Bojong tahun 2019-2024 dan pedoman kerja Kecamatan Bojong Tahun 2023;
2. Untuk memberikan gambaran program atau kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2023;

3. Untuk memberikan gambaran tentang target kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bojong Tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika**

Rancangan akhir Renja PD Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang penyusunan rancangan Renja PD meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja PD Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal 2022.

##### **BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOJONG**

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisa kinerja pelayanan PD, isu-isu penting tentang tugas dan fungsi PD, serta review terhadap rancangan awal PD dan penelaahan usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan tahun 2022.

##### **BAB III: TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

Terdiri dari telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja PD serta program dan kegiatan.

##### **BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Terdiri dari rencana kegiatan dan program serta target untuk tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023.

##### **BAB V: PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu**

Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah untuk memastikan kesinambungan program dan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2021 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) subkegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bojong.

Kecamatan Bojong mempunyai program-program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Secara rinci evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.  
Capaian Kinerja Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal sampai dengan Desember 2021

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	s.d Desember	Individual		
				Keu.	Fisik	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.668.430.000,00</b>	<b>1.385.960.580,00</b>	<b>83,07</b>	<b>69,22</b>	
<b>'7 01.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>4.812.500,00</b>	<b>17,82</b>	<b>17,82</b>	
7 01.01.2.01.01	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.050.000,00	180.000,00	2,98	2,98	APBD
7 01.01.2.01.06	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.950.000,00	4.632.500,00	22,11	22,11	APBD
<b>7 01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.168.924.000,00</b>	<b>1.093.482.827,00</b>	<b>93,55</b>	<b>93,55</b>	
7 01.01.2.02.01	Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.136.424.000,00	1.063.582.827,00	93,59	93,59	APBD
7 01.01.2.02.03	Sub Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.500.000,00	29.900.000,00	92,00	92,00	APBD
<b>7 01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>70.726.000,00</b>	<b>56.556.700,00</b>	<b>79,97</b>	<b>80,10</b>	
7 01.01.2.06.01	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.886.000,00	96,20	96,33	APBD
7 01.01.2.06.02	Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.926.000,00	5.020.700,00	84,72	85,86	APBD
7 01.01.2.06.03	Sub Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	2.974.000,00	99,13	99,95	APBD
7 01.01.2.06.04	Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.400.000,00	9.789.000,00	63,56	63,56	APBD
7 01.01.2.06.05	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	5.031.000,00	89,84	89,84	APBD

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	s.d Desember	Individual		
				Keu.	Fisik	
7 01.01.2.06.06	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	3.000.000,00	-	-	-	APBD
7 01.01.2.06.09	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.800.000,00	30.856.000,00	88,67	88,67	APBD
<b>7 01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
7 01.01.2.07.06	Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	-	-	-	APBD
7 01.01.2.07.10	Sub Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00	APBD
<b>7 01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>99.780.000,00</b>	<b>91.812.053,00</b>	<b>92,01</b>	<b>92,01</b>	
7 01.01.2.08.01	Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	APBD
7 01.01.2.08.02	Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.900.000,00	20.952.053,00	95,67	95,67	APBD
7 01.01.2.08.04	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.880.000,00	67.860.000,00	90,63	90,63	APBD
<b>7 01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>39.296.500,00</b>	<b>75,57</b>	<b>75,57</b>	
7 01.01.2.09.01	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.000.000,00	23.303.500,00	72,82	72,82	APBD
7 01.01.2.09.06	Sub Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	3.240.000,00	54,00	54,00	APBD

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	s.d Desember	Individual		
				Keu.	Fisik	
7.01.01.2.09.10	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.000.000,00	12.753.000,00	91,09	91,09	APBD
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>145.651.000,00</b>	<b>83.701.000,00</b>	<b>57,47</b>	<b>57,47</b>	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>145.651.000,00</b>	<b>83.701.000,00</b>	<b>57,47</b>	<b>57,47</b>	
7.01.02.2.04.01	Sub Keg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.050.000,00	4.026.000,00	99,41	99,41	APBD
7.01.02.2.04.03	Sub Keg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	141.601.000,00	79.675.000,00	56,27	56,27	APBD
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>42.129.000,00</b>	<b>39.382.200,00</b>	<b>93,48</b>	<b>93,48</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>42.129.000,00</b>	<b>39.382.200,00</b>	<b>93,48</b>	<b>93,48</b>	
7.01.03.2.01.01	Sub Keg Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	42.129.000,00	39.382.200,00	93,48	93,48	APBD
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>40.950.000,00</b>	<b>38.387.500,00</b>	<b>93,74</b>	<b>93,74</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>40.950.000,00</b>	<b>38.387.500,00</b>	<b>93,74</b>	<b>93,74</b>	

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	s.d Desember	Individual		
				Keu.	Fisik	
7.01.05.2.01.07	<i>Sub Keg Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	4.350.000,00	4.194.500,00	96,43	96,43	APBD
7.01.05.2.01.08	<i>Sub Keg Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	36.600.000,00	34.193.000,00	93,42	93,42	APBD
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>21.900.000,00</b>	<b>16.163.770,00</b>	<b>73,81</b>	<b>73,90</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>21.900.000,00</b>	<b>16.163.770,00</b>	<b>73,81</b>	<b>73,90</b>	
7.01.06.2.01.01	<i>Sub Keg Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	4.800.000,00	3.014.000,00	62,79	62,79	APBD
7.01.06.2.01.03	<i>Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	8.400.000,00	5.770.500,00	68,70	68,70	APBD
7.01.06.2.01.07	<i>Sub Keg Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	4.350.000,00	3.684.770,00	84,71	85,20	APBD
7.01.06.2.01.11	<i>Sub Keg Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	4.350.000,00	3.694.500,00	84,93	84,93	APBD
<b>J U M L A H</b>		<b>1.919.060.000,00</b>	<b>1.563.595.050,00</b>	<b>81,48</b>	<b>81,48</b>	

Indikator kinerja urusan pemerintahan fungsi penunjang dicapai melalui 4 (empat) program peningkatan layanan di kecamatan Bojong yaitu:

**1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Dalam program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdapat satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan dua sub kegiatan antara lain:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.

Kegiatan PATEN di kecamatan Bojong sudah terkoordinasi dengan baik, masyarakat sudah mulai mengerti layanan PATEN ada yang dilaksanakan secara online dan offline. Indikator terlaksananya koordinasi PATEN terealisasi 5 laporan. Koordinasi pelaksanaan kegiatan IMB belum maksimal terealisasi. Terlihat dari masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya IMB. Koordinasi pelaksanaan kegiatan IUMK belum maksimal terealisasi karena untuk pengajuan IUMK masih blm ada.

- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, terdiri output pada subkegiatan sebagaiberikut:

1. Rakor TB, PKBM, Kesehatan, Mitigasi, Pendidikan, verval data kemiskinan, penderasan PBB,

Indikator terlaksananya penderasan PBB terealisasi dengan status kinerja 73,47%.

2. Rakor persampahan, sarpras, kebersihan lingkungan dan air bersih. Rakor sarpras terealisasi dengan status kinerja 100% sedangkan rakor persampahan dan kebersihan lingkungan dan air tidak terealisasi karena adanya pandemi covid

3. Fasilitasi PKK,MTQ,Hari Jadi/dokter kecil, pesta siaga, kepemudaan, tilik desa dan persandian

Indikator terlaksananya PKK terealisasi dengan status kinerja 100%, dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Indikator terlaksananya rakor kepemudaan terealisasi dengan status kinerja 100%, dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Indikator terlaksananya Karangtaruna, Karawitan, FASI, MTQ, hari jadi kab. Tegal, tilik desa dan persandian tidak dapat terealisasi. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tegal sehingga diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

4. Terlaksananya HUT RI

Indikator terlaksananya HUT RI terealisasi dengan status kinerja 100% dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

5. YAUMI, Pelatihan pemberdayaan masyarakat

Indikator terlaksananya Yaumi terealisasi namun dilaksanakan dalam skala kecil dengan memperhatikan protokol kesehatan

6. Rakor penertiban IMN. Terealisasi dengan status kinerja 100%

**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdapat satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dengan satu sub kegiatan yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Output dari subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan musrenbang, penyusunan RKPDes dan RAPBDes. Indikator terlaksananya output kegiatan tersebut terealisasi dengan status kinerja 100%.

b. Pembinaan LPMD, RTRW, KPMD, Rakor pendampingan desa. Indikator terlaksananya output kegiatan tersebut terealisasi dengan status kinerja 100%.

**3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Dalam program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdapat satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan pemerintah daerah, dengan dua sub kegiatan antara lain:

a. Pelaksanaan semua urusan pemerintaan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan ole instansi vertikal. Output subkegiatan ini berupa pembinaan organisasi kemasyarakatan terealisasi dengan status kinerja 100 % dengan menerapkan protokol kesehatan

- b. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.  
Indikator terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan (forkompincam) terealisasi 12 bulan koordinasi dengan status kinerja 100%. Tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Penanganan penyebaran covid-19 di lingkungan kecamatan melalui operasi yustisi gabungan yang dilakukan oleh kecamatan bojong dengan polsek bojong dan danramil kecamatan bojong terlaksana rutin.

#### **4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Dalam program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdapat satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan 4 (empat) sub kegiatan antara lain:

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Output subkegiatan ini adalah monitoring penyusunan LKPJDes terealisasi dengan status kinerja 100%.
- b. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa. Output subkegiatan ini adalah monitoring pembinaan bantuan keuangan desa dan monitoring pengelolaan bumdes terealisasi dengan status kinerja 100%.
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa. Indikator terlaksananya monitoring Badan Permusyawaratan Desa dapat dilaksanakan terealisasi dengan status kinerja 100%.
- d. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terealisasi dengan status kinerja 100% yaitu membantu penanganan penyebaran covid-19 di lingkungan kecamatan melalui operasi yustisi.

Berdasarkan evaluasi 4 (empat) program peningkatan layanan di kecamatan Bojong dapat disimpulkan terdapat kegiatan yang terealisasi maupun tidak. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor-faktor yang pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

- 1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan



2. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui rapat evaluasi bulanan dan triwulan.

Namun demikian terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja antara lain sebagaiberikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia di kantor Kecamatan Bojong
2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja operasional dan sistem/mekanisme dan prosedur dalam pencairan dan pertanggungjawaban oleh PPTK karena adanya keterbatasan tenaga dan adanya pandemi covid-19 yang membatasi semua aktivitas kerja.

Untuk menunjang keberhasilan suatu perencanaan diperlukan upaya-upaya untuk dalam peningkatan kinerja dan komitmen semua pihak terkait dalam pelaksanaannya, sehingga dalam proses tersebut terlihat keterlibatan seluruh komponen atau unsur dalam sistem tersebut, yakni:

- a. Pengambil kebijakan mengarahkan pada sasaran tujuan organisasi.
- b. Mengoptimalkan sumber daya.
- c. Saling memberikan informasi yang memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan maupun dalam setiap penyelesaian tugas.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- e. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar kegiatan dapat berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- f. Perencanaan penganggaran kegiatan yang lebih cermat sehingga kedepannya anggaran kegiatan tepat memenuhi kebutuhan.
- g. Komitmen dan kerjasama seluruh ASN di lingkungan kecamatan Bojong untuk meningkatkan pelayanan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini:

Tabel T.C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Tegal

## Kecamatan Bojong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bojong	100 Persen		100 Persen	91 Persen	91%	100 Persen	48 Persen	48%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	50 Persen	50%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, SPIP, PK, IKU Rencana Aksi	24 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100%	6 Dokumen	14 Dokumen	58%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen LkjIP, LKPJ, dan LAKIP, LKPD	16 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	50%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>96 Persen</b>	<b>96%</b>	<b>100 Persen</b>	<b>49 Persen</b>	<b>49%</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	4 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun	50%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya operasional penunjang pengelola keuangan	48 Bulan		12 Bulan	11 Bulan	92%	12 Bulan	23 Bulan	48%
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50 Persen</b>	<b>50%</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen listrik/ Penerangan bangunan Kantor	24 Jenis		6 Jenis	6 Jenis	100%	7 Jenis	13 Jenis	54%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	208 Jenis		26 Jenis	26 Jenis	100%	52 Jenis	78 Jenis	38%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga/ kebersihan	88 Jenis		21 Jenis	21 Jenis	100%	22 Jenis	43 Jenis	49%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	48 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	50%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	16 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	8 Jenis	50%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	50%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	48 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	50%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeirntah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		100 Persen	50 Persen	50%	100 Persen	38 Persen	38%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan studio video conference, pengadaan laptop dan printer	4 Paket		1 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	1 Paket	25%
7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	4 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan peyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	50,00 Persen	50%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	200%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daaya air dan listrik	48 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	50%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL)	48 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	50%
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barnag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50 Persen</b>	<b>50%</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda dua dan roda empat	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	200%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan/ gedung kantor	4 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50%
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN</b>	<b>IKM Kecamatan Bojong</b>	<b>84,12 Persen</b>		<b>80,87 Persen</b>	<b>91,00 Persen</b>	<b>1013%</b>	<b>82,12 Persen</b>	<b>82,12 Persen</b>	<b>98%</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>									
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 Persen					100 Persen	25 Persen	25%
7.01.02.2.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Taman bacaan masyarakat; rakor sanitasi; rakor persampahan; tilik desa; Jumlah survey IKM Masyarakat	15 Kegiatan					5 Kegiatan	5 Kegiatan	33%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.	100 Persen		100 Persen	70 Persen	70%	100 Persen	42 Persen	42%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha	Terlaksananya PATEN; IMB dan IUMK	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		1 Kegiatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya PATEN Rakor TB, PKBM, Kesehatan, Mitigasi, Pendidikan, Verval data kemiskinan dan penderasan PBB, Rakor Persampahan, Sarpras, Kebersihan lingkungan dan air bersih, FASI' Karawitan; MTQ; Hari jadi/Dokter Kecil, Pesta Siaga; PKK; Posyandu; Kepemudaan; Yaumi; Rakor PAUD, Hut RI, Penertiban IMN	23		23 Kegiatan	9 Kegiatan	39%	2 Kegiatan	11 Kegiatan	48%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Bojong;	35 Persen		29 Persen	0 Persen	0%	0 Persen	0 Persen	0%
		Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Bojong	18 Persen		12 Persen	0 Persen	0%	0 Persen	0 Persen	0%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	50 Persen	50%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang Kec/Des RKPD	7 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	5 Kegiatan	71%
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemeirntah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Pelatihan Manajemen BUMDes; Rakor Pasar Desa	6 Kegiatan					2 Kegiatan	2 Kegiatan	33%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya FASI' Karawitan; MTQ; Pesta Siaga; PKBM; PKK; Posyaandu; Rakor Kemiskinan; Karangtaruna; Yaumi; Rakor PAUD.	33 Kegiatan					11 Kegiatan	11 Kegiatan	33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	100 Persen					100 Persen	25 Persen	25%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	100 Persen					100 Persen	25,00 Persen	25%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rakor mitigasi bencana; jumlah kegiatan Siskamling;Jumlah kegiatan satgas covid 19	9 Kegiatan					3 Kegiatan	3 Kegiatan	33%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan	100 Persen					100 Persen	25 Persen	25%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan kadarkum	3 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	33%
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	50 Persen	50%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	50 Persen	50%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kedatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Hari jadi; HUT RI; Pameran Invstasi	9 Kegiatan					3 Kegiatan	3 Kegiatan	33%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya FKDM	3 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	33%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forkompincam	4 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	50%
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang tertib adminstrasi Kecamatan Bojong</b>	<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50 Persen</b>	<b>50%</b>
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah desa tertib administrasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	50 Persen	50%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Desa</b>									
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemeirntahan Desa	Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintahan desa, Profil Desa, Monitoring Pembinaan Administrasi Desa, Lomba Desa, Rakor Pemerintah Desa	12 Kegiatan					4 Kegiatan	4 Kegiatan	33%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Monitoring ADD/DD, Monitoring Bantuan Keuangan Desa, Monitoring Pembinaan Aset Desa, Pelatihan managemen Bumdes, Evaluasi RKPDes , Pengelolaan Keuangan Desa	20 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	8 Kegiatan	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Desa	3 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	33%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina	3 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	33%
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		1 Kegiatan	100%
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat Desa terisi	3 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	33%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa tersusun	3 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	33%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		1 Kegiatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran keg s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dan peningkatan kapasitas	4 Kegiatan					2 Kegiatan	2 Kegiatan	50%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Bojong berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang kewilayahan, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Bojong dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Bojong disajikan pada tabel T-C.30 berikut ini:



**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Tegal**

**Kecamatan Bojong**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15
1.	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan			1,25	1,25	1	1	11,38	-	0	0	
2.	Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi			15	18	21	11	18	-	21	11	
3.	Peningkatan Persentase Desa Mandiri			11.76	0	5.88	0	0	-	5.88	0	
4.	Peningkatan Persentase Desa Maju			0	0	5.88	0	0	-	5.88	0	

Dari tabel T-C.30 diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. **Indikator Kinerja Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan**  
 IKM Kecamatan Bojong berjalan mulai tahun 2020 dengan capaian 79.62% dan untuk tahun 2021 dengan capaian 91,00%, mengalami kenaikan 11,38%.
- b. **Indikator Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi**  
 Indikator peningkatan persentase desa yang tertib administrasi berjalan mulai tahun 2020 dengan capaian 35% dan untuk tahun 2021 dengan capaian 50%, mengalami kenaikan sebesar 18%.
- c. **Indikator Peningkatan Persentase Desa Mandiri**  
 Indikator peningkatan persentase desa mandiri kecamatan bojong tidak terealisasi sesuai target, dimana pada tahun 2021 seharusnya terdapat kenaikan target penambahan desa mandiri sebesar 11,76%.
- d. **Indikator Peningkatan Persentase Desa Maju**  
 Indikator peningkatan persentase desa maju dengan terealisasi sesuai terget, tidak ada kenaikan target dari tahun 2020 yaitu 17 desa dengan kriteria 1 desa maju. Adapaun data klasifikasi desa maju kecamatan bojong tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4.  
 Data Perkembangan Desa di Wilayah Kecamatan Bojong  
 Tahun 2021

No	Desa	Mandiri	Maju	Berkembang
1	Rembul		✓	
2	Dukuhtengah			✓
3	Kedawung		✓	
4	Suniarsih			✓
5	Karangmulya			✓
6	Tuwel		✓	
7	Bojong		✓	
8	Buniwah		✓	
9	Lengkong			✓
10	Batunyana			✓
11	Sangkanayu			✓

No	Desa	Mandiri	Maju	Berkembang
12	Gunungjati			✓
13	Pucangluwuk			✓
14	Kajenengan			✓
15	Kalijambu			✓
16	Danasari			✓
17	Cikura			✓
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>

Untuk indikator peningkatan persentase desa maju pada tahun 2021 tidak terdapat kenaikan target desa maju dari tahun 2020. Jumlah persentase desa maju di kecamatan bojong sebesar 29,41%. Perhitungan dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah Desa yang Ada}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{17} \times 100\% = 29,41\%$$

Sebagaimana sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2023 juga memuat evaluasi tahun sebelumnya yakni tahun 2021. Dalam evaluasi terhadap Renja Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan
- b. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan
- c. Hasil rencana program dan kegiatan

Dalam melakukan evaluasi kinerja kami menggunakan pengukuran dengan menghitung persentase capaian kinerja pada masing-masing kegiatan

untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Bojong Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel T-C.30, dapat diketahui bahwa semua indikator IKU Kecamatan Bojong memenuhi target. Hal ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBDes.
- c. Tiap desa telah menyusun RKA masing-masing kegiatan.
- d. Ada review RPJM sesuai dengan RKP.

### **2.3. Isu Penting**

Isu-isu strategis pada Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2023 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur kewilayahan antara lain adalah dengan adanya sinergi antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bojong dengan RPJMD Kabupaten Tegal. Hal ini selaras dengan tujuan dan sasaran strategi yang tercantum dalam RPJMD Kab. Tegal. Maka Kecamatan Bojong ikut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal melalui tugas umum pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, penerpaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

#### **Tantangan Pelayanan OPD**

1. Kurangnya sosialisasi dari OPD terkait kepada aparatur pemerintah desa tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 yang mengatur Pedoman Administrasi Desa.
2. Mempertahankan konflik SARA di kecamatan agar tetap nol.

3. Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa karena kapasitas SDM di pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
4. Belum berfungsinya aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- New Generation) sehingga data miskin dari desa belum dapat diakses baik merubah dan juga memvalidasi sesuai perkembangan data miskin.
5. Belum optimalnya SDM Aparatur Kecamatan dan Desa.
6. Keterbatasan jumlah pegawai di Kecamatan.
7. Keterbatasan sarana dan prasarana.
8. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
9. Kurangnya koordinasi Dinas/ Instansi Tingkat Kecamatan.
10. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan.
11. Jauh dari ibu kota Kabupaten Tegal

#### **Peluang Pelayanan OPD**

1. Adanya pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang manajemen pemerintahan desa.
2. Adanya dukungan dari aparat kepolididan dan TNI (Forkompincam).
3. Adanya sistem Keuangan Desa (Sikudes) yang sangat membantu dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan desa.
4. Adanya Aplikasi DKTS yang dapat mengakses, merubah dan memvalidasi data miskin dari desa.
5. Adanya dukungan Instansi/Dinas terkait melalui program pamsimas.
6. Wilayah kerja yang cukup strategis.
7. Program Nasional Keluarga Berencana.
8. Adanya Aplikasi SDGs

#### **Isu-Isu Penting Kecamatan Bojong:**

1. Belum optimalnya mempertahankan nilai IKM Kecamatan.

Nilai IKM Kecamatan yang bagus itu perlu dipertahankan, karena pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga

layanan publik. Adapun pengukuran nilai IKM Kecamatan harus dilaksanakan terencana sebaik mungkin.

2. Masih rendahnya desa tertib administrasi.

Masih rendahnya desa yang tertib administrasi, karena desa yang tertib administrasi berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Belum bertambahnya jumlah desa maju.

Desa maju atau bisa disebut desa pra sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

4. Belum terwujudnya desa mandiri.

Belum terwujudnya desa mandiri, karena desa mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Adanya kerjasama yang baik, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, memiliki kemampuan keahlian, keterampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

#### **2.4. Review Rancangan Awal RKPD**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kabupaten Tegal merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang perlu ditindak lanjuti.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2023 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunan Rancangan RKPD mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019-2024 Pemerintah

Kabupaten Tegal. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bojong Tahun 2023 seperti yang tertera pada tabel T-C.31 berikut:

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bojong	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah	100%	1.562.844.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bojong	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	100%	1.570.171.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bojong	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu		28.050.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bojong	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu		5.750.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojong	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, Rencana Aksi	5 Dokumen	11.550.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.500.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bojong	Jumlah dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, LAKIP, SPIP	5 Dokumen	16.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.250.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojong	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu		1.218.809.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojong	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu		1.116.661.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bojong	terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.176.239.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bojong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 Orang/ Bulan	1.061.701.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bojong	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	42.570.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	54.960.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bojong	pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		63.415.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bojong	pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	53.537.800	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bojong	jumlah jenis penerangan bangunan kantor	6 jenis	3.300.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bojong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.002.300	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bojong	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	26 jenis	18.425.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bojong	Jumla Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	18.300.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bojong	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia	21 jenis	8.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bojong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	3.163.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bojong	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	12 Bulan	16.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bojong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	9.960.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bojong	jumlah jenis barang cetakan	2 jenis	3.630.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bojong	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1.641.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bojong	jumlah bahan bacaan	12 Bulan	3.300.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Bacaan dan Praturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bojong	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	12 Bulan	9.460.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bojong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	14.471.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bojong	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)		49.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bojong	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)		230.140.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bojong	Jumlah Kendaraan dinas tersedia	1 unit	49.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bojong	Jumlah Unit Kendaraan Prorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	30.140.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bojong	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bojong	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bojong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantr atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bojong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantr atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	200.000.000	POKIR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bojong	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah		113.070.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bojong	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah		102.715.200	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bojong	jumlah materai	57 lembar	570.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bojong	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	660.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Kecamatan Bojong	jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	29.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Kecamatan Bojong	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	29.791.200	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bojong	terpeliharanya kebersihan kantor	12 Bulan	83.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bojong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yan disediakan	12 Laporan	72.264.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bojong	jumlah BMD dalam kondisi baik		90.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bojong	jumlah BMD dalam kondisi baik		61.367.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan	Kecamatan Bojong	jumlah kendaraan dinas (mobil dan motor) terpelihara,	10 unit	68.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan	Kecamatan Bojong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yan dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	49.500.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bojong	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara	5 jenis	6.600.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bojong	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	5.560.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bojong	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 Paket	15.400.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bojong	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Paket	6.307.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bojong	IKM Kecamatan Bojong	83,12%	27.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bojong	IKM Kecamatan Bojong	91%	62.840.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bojong	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan		22.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bojong	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan		58.840.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bojong	jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kec., survey IKM terlaksanakan	5 kegiatan	22.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	58.840.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bojong	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yg terlaksanakan		5.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bojong	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yg terlaksanakan		4.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bojong	Jumlah desa lunas PBB, Jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur	2 kegiatan	5.500.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bojong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bojong	Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	5,88%	97.900.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bojong	Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	5,88%	77.300.000	
			Persentase desa maju Kecamatan Bojong	5,88%				Persentase desa maju Kecamatan Bojong	5,88%		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bojong	Ketersediaan data perkembangan desa		97.900.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bojong	Ketersediaan Data Perkembangan Desa		77.300.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bojong	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang	1 Kegiatan	25.300.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Kemasyarakatan	18.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Bojong	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan	2 kegiatan	4.400.000	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan Bojong	1 Dokumen	2.300.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojong	Jumlah Rakor Kemiskinan desa, jumlah jenis keg festival budaya, jumlah rakor anak/paud, keg MTQ, Jumlah rakor pemuda, keg fasi, keg Yaumi, keg Posyandu, Keg pesta siaga, keg PKBM, Rakor PKK, jumlah pameran pembangunan dilaksanakan	11 Kegiatan	68.200.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bojong	11 Laporan	56.200.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	100%	11.550.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	100%	12.400.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bojong	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana		8.250.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bojong	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana		8.700.000	
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojong	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling	2 Kegiatan	8.250.000	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	8.700.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bojong	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan		3.300.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bojong	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan		3.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bojong	Jumlah Koordinasi Pengakan Perda dan Jumlah sosialisasi perda	1 Kegiatan	3.300.000	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bojong	Jumlah Laporan Korrdinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	3.700.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bojong	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	100%	44.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bojong	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	100%	107.900.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bojong	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum		44.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bojong	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum		107.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Bojong	jumlah kegiatan Hari Jadi & HUT RI, Pameran Investasi	3 kegiatan	17.600.000	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Bojong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kedaulatan Republik Indonesia	240 orang	38.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Bojong	Jumlah kegiatan FKDM	1 Kegiatan	3.300.000	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Bojong	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	20 Orang	3.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bojong	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	12 Bulan	23.100.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	66.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bojong	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	89%	104.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bojong	Persentase desa tertib administrasi Kecamatan Bojong	89%	66.450.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah desa tertib administrasi		104.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah desa tertib administrasi		66.450.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	22.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	18.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	6 kegiatan	7.700.000	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	14.350.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina	1 Kegiatan	3.300.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	6.800.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	16.300.000	
	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Perangkat Desa Terisi	1 Kegiatan	2.750.000	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	2.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan/Rancangan Akhir Renja					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	1 Kegiatan	5.500.000	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	4.500.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojong	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kegiatan	63.250.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojong	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.300.000	
					<b>1.848.294.000</b>					<b>1.897.061.000</b>	

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD dan hasil forum OPD dan Musreng. Pagu anggaran OPD yang ditetapkan dalam forum OPD sebesar Rp.400.000.000,00 dengan tambahan Rp.10.000.000,00 dikalikan 17 jumlah desa. Sehingga pagu anggaran Kecamatan Bojong tahun 2023 sebesar Rp. 570.000.000,00.
2. Alokasi anggaran gaji dan tunjangan ASN lebih kecil dari yang dianggarkan pada rancangan awal renja.
3. Terdapat beberapa perubahan sub kegiatan diantaranya, penambahan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini diperlukan untuk menampung anggaran guna mendukung pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak di tahun 2023.
4. Penambahan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk kegiatan tilik desa.
5. Penambahan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 untuk kegiatan pemilihan kepala desa.
6. Penambahan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Kantor Lainnya untuk penataan lingkungan kantor.

## **2.5. Penelaahan Usulan Masyarakat**

Secara umum, rancangan awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Bojong pada Tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodevikasi, nomenklatur perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah. Adanya penyesuaian pagu anggaran dari pemerintah Kabupaten Tegal (TAPD), Pokir dari DPRD dan usulan/ aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang. Adanya penyesuaian pada saat pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran (PPAS).

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Bojong merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang dari 17 (tujuh belas) desa di Kecamatan Bojong akan

diusulkan dan dimusyawarahkan di tingkat Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya hasil dari Musrenbang Kecamatan tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.

Hasil usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan untuk Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Bojong disajikan pada tabel 2.6 berikut.



Tabel 2.6

## Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan untuk Tahun 2023

## Kecamatan Bojong

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume Kegiatan	Nilai (Rp)	Nilai Total	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB) SMP	Desa Suniarsih RT.08 RW.02	1 Ruang	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pembangunan Dranase Jalan	Desa Kajenengan, RT.01 /02	1 Paket	Rp 360.800.000	Rp 360.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
3	Pelatihan Pertukangan/Mebelair	Desa Kajenengan	1 Paket	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Rembul 1	Desa Rembul	1 Ruang	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pelatihan Mekanuk Sepeda Motor	Desa Karangmulya	1 Paket	Rp 52.000.000	Rp 52.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
6	Pengembangan Jaringan SPAM	Desa Karangmulya	1 Paket	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
7	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Gunungjati, RT.06/02	200 Meter	Rp 345.000	Rp 69.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Pelatihan Menjahit	Desa Gunungjati	1 Paket	Rp 52.000.000	Rp 52.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
9	Pembangunan Dranase Jalan	Desa Danasari	200 Meter	Rp 1.804.000	Rp 360.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
10	Pelatihan Inkubasi Bisnis berbasis IT	Desa Danasari	1 Paket	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000	Dinas Kominfo
11	BOP kejar Paket C	Desa Pucang Luwuk.	50 Siswa	Rp 1.800.000	Rp 90.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Pelatihan Inkubasi Bisnis berbasis IT	Desa Dukuhtengah	1 Paket	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000	Dinas Kominfo
13	Merdeka sampah	Desa Dukuhtengah	1 Paket	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume Kegiatan	Nilai (Rp)	Nilai Total	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
14	Pelatihan Inkubasi Bisnis berbasis IT	Desa Tuwel	1 Paket	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000	Dinas Kominfo
15	LPJU dengan Konsul	Desa Tuwel	10 Titik	Rp 6.500.000	Rp 65.000.000	Dinas Perhubungan
16	Rehab Berat Gedung SD	Desa Kedawung	1 Ruang	Rp 108.000.000	Rp 108.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Pembangunan Talud Beton K,175	Desa Sangkanayu	100 M3	Rp 1.147.000	Rp 114.700.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
18	Pecegahan Gizi Buruk (stunting)	Desa Lengkong	1 Paket	Rp 6.750.000	Rp 6.750.000	Dinas Kesehatan
19	Dranase jalan	Desa Lengkong	100 M <sup>3</sup>	Rp 1.804.000	Rp 180.400.000	Dinas Pekerjaan Umum
20	Rehab Berat Gedung SD	Desa Batunyana	1 Paket	Rp 108.000.000	Rp 108.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor	Desa Batunyana	1 Paket	Rp 52.000.000	Rp 52.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
22	Pembangunan Dranase Jalan	Desa Cikura	125 M <sup>3</sup>	Rp 1.804.000	Rp 225.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
23	Pelatihan Inkubasi Bisnis berbasis IT	Desa Bojong	1 Paket	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000	Dinas Kominfo
24	Rehab Sedang Gedung SD 04	Desa Bojong	1 Lokal	Rp 81.000.000	Rp 81.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	BOP kejar Paket C	Desa Buniwah	50 Siswa	Rp 1.800.000	Rp 90.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Desa Buniwah	200 M <sup>3</sup>	Rp 345.000	Rp 69.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
27	RTLH	Desa Kalijambu	3 Paket	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000	Dinas Perkimtaru
	<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 3.024.950.000</b>	

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih cepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dan bukan oleh Kecamatan Bojong. Namun proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bojong, terhadap seluruh OPD yang lain, sebagai representasi kebutuhan masyarakat. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Selain usulan program dari masyarakat, pemerintah kecamatan Bojong juga menampung usulan pokok pikiran (pokir) aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal. Usulan pikir ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Usulan program dan kegiatan masyarakat tergambar pada tabel T.C-32.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Tegal

**Kecamatan Bojong**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Banguna n Kantor Lainnya	Kecamata n Bojong	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara	500 m2	Pengadaan Lingkungan Kantor Kecamatan Bojong

## BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

### 3.1. Telaah Kebijakan Nasional

Awal tahun 2020 seluruh negara dihantam *pandemi COVID-19*. *Pandemi COVID-19* tersebut tidak hanya memunculkan masalah dibidang kesehatan saja, namun juga memberikan tekanan struktur ekonomi secara massive keseluruh negara. Di Indonesia *COVID-19* mampu mengacak-acak struktur ekonomi nasional. Hal ini memaksa pemerintah mengoreksi berbagai target ekonomi ditahun 2021. Di Kabupaten Tegal sendiri *COVID-19* memberikan pukulan ekonomi yang tidak kecil. Berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar yang memaksa perusahaan juga merumahkan bahkan mem-PHK karyawan. Dari laporan yang ada, sudah ada 161 karyawan dirumahkan dan 461 karyawan di-PHK. Bahkan disinyalir sudah ada ribuan karyawan dari berbagai skala industri di PHK namun tidak dilaporkan. Disektor informal, sektor usaha mikro, pedagang eceran, serta pelaku usaha transportasi juga mengalami dampak yang cukup berat. Pelaku usaha transportasi mulai dari tukang ojek online, ojek pangkalan, kusir andong, sopir angkot, tukang becak yang jumlahnya tidak kurang dari 2.765 orang yang sebagian besar berada di Kecamatan Slawi dan Adiwerna dilaporkan pendapatannya menurun hingga 26,02%.

Ada beberapa hal yang dirasa bisa memperlama eksistensi *COVID-19* di Kabupaten Tegal jika tidak segera diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat. Hal tersebut berkaitan dengan perilaku masyarakat yang sangat ditentukan oleh latar belakang sosial, budaya dan religi. Dengan melihat latar belakang masyarakat Kabupaten Tegal yang penuh dengan kegiatan sosial, budaya, keagamaan, ditambah dengan aktifitas ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah, maka pola penanganan *COVID-19* yang berupa *Work From Home* dan *Social distancing* akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Apalagi saat ini sudah mendekati hari raya Idul Fitri. Buktinya kondisi saat ini di Kabupaten Tegal jalanan masih padat, kerumunan masih banyak dijumpai, dan gerakan mudik dari zona merah yang massive sulit bisa dicegah dan tidak terpantau. Sementara itu jika kondisi tersebut dibiarkan, sektor-sektor ekonomi besar-kecil semakin lama akan semakin lumpuh. Akan lebih banyak lagi tambahan karyawan di PHK bahkan perusahaan gulung tikar. Sementara keberhasilan pencegahan dan penanggulangan wabah dari sisi kesehatan belum bisa diukur dengan jelas. Untuk itu kecepatan dan ketepatan menangani pandemic ini sangat menentukan kecepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelahnya.

Beberapa kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, jika tidak dicarikan dan diimplementasikan suatu alternatif yang solutif ditahun ini (2020), maka muncul kemungkinan ditahun 2023 *COVID-19* masih eksis

merusak perekonomian wilayah Kabupaten Tegal. Untuk itu setidaknya isu strategis yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2022 terkait *COVID-19* antara lain:

1. Penanganan Lanjutan *COVID-19*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika penanganan *COVID-19* Kabupaten Tegal tahun 2022 belum solutif, maka masalah *COVID-19* masih akan dialami ditahun 2022. Untuk itu sebagai langkah antisipasi ditahun 2021, maka penanganan *COVID-19* tahun 2020 perlu dievaluasi sebagai dasar perbaikan penanganan *COVID-19* yang lebih efektif dan efisien.

2. Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca *COVID-19*

Pemulihan sosial ekonomi pasca *COVID-19* sangat tergantung kecepatan dan ketepatan penanganannya. Semakin lama proses penanganannya maka semakin lama pula proses pemulihannya. Hal tersebut terkait dengan seberapa besar kerusakan sosial-ekonomi yang dialami. Untuk itu tahun upaya-upaya pemulihan sosial-ekonomi pasca *COVID-19* ditahun 2022 harus menjadi salah satu guideline program/kegiatan perangkat daerah ditahun 2022. Berbagai kebijakan khususnya terkait stimulus ekonomi masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingga kecil harus dikeluarkan melalui berbagai program/kegiatan seluruh Perangkat Daerah yang terkait. Selain itu mengingat potensi meningkatnya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Kabupaten Tegal yang cukup besar, maka Perangkat Daerah terkait khususnya (Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM) perlu merumuskan kebijakan strategis yang efektif dan efisien ditahun 2022.

3. Transformasi ekonomi wilayah potensial

Pandemi *COVID-19* secara luas telah merusak struktur ekonomi secara luas. Rantai-rantai perekonomian-pun secara umum telah rusak. Belajar dari realita yang ada, transformasi ekonomi wilayah perlu mendapatkan perhatian. Ada beberapa potensi transformasi ekonomi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Tegal antara lain:

- a. Digitalisasi ekonomi wilayah mulai skala kecil hingga besar. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi *COVID-19* di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat di semua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk kedalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini mempunyai potensi pengembangan mulai dari hulu-hilirnya. Untuk itu perlu di-manage keterkaitan hulu hilirnya (*supply chain management*).
- b. Rusaknya struktur ekonomi secara luas berpotensi semua pelaku usaha (besar) bisa mengambil peran pelaku usaha lain. Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan khususnya di industri logam dan pengolahan hasil pertanian. Untuk itu industri-industri tersebut harus didorong agar bisa berperan masuk ke sektor ekonomi yang sama yang

ditinggalkan oleh industri sejenis di tempat lain yang tidak adaptif bahkan gulung tikar. Atau minimal peran sektor industri lokal tidak diambil oleh pelaku dari luar.

Perlu dilakukan suatu inovasi dan inkubasi usaha ekonomi yang potensi permintaannya pasarnya besar akibat pandemic *COVID-19* namun supply-nya masih sangat rendah. Untuk itu perlu dilakukan riset pasar yang tepat. Misalnya, adanya potensi industri kesehatan. Tidak cukup hanya menjelaskan bisnis kesehatan saja, tetapi harus lebih fokus misalkan APD, *handsanitizer*, dll.

### 3.2. Tujuan Sasaran Renja PD

#### 1. Tujuan

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Bojong tahun 2019-2024 mengalami sedikit perubahan, yang sebelumnya adalah “Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan Bojong” berubah menjadi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

#### 2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bojong mengalami perubahan, yang sebelumnya hanya ada 1 (satu) sasaran yaitu “Terwujudnya Desa Mandiri” berubah menjadi 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
- b. Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa

#### 3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah dan fokus kebijakan Kecamatan Bojong dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Arah Kebijakan

No	2023
	Tema: Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan Hidup yang Nyaman
1.	Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan

No	2023
	yang baik
2.	Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju
3.	Penurunan gangguan trantibum
4.	Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
5.	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa

#### 4. Pengarus Utamaan dalam Pembangunan

Pembangunan di Kabupaten Tegal didesain melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengarusutamaan (mainstreaming) merupakan upaya untuk menjadikan isu-isu pengarusutamaan sebagai perspektif, sebagai cara pandang dan cara bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Program dan kegiatan dalam pengarusutamaan (mainstreaming) tidak harus selalu eksplisit memuat nomenklatur isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming) namun dapat secara implisit mendukung terwujudnya isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming). Isu-isu pengarusutamaan dalam pembangunan di Kabupaten Tegal yaitu:

##### a. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) didesain sebagai perspektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender memberi ruang yang cukup bagi konstruksi gender laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, pengawasan dan manfaat dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.

##### b. Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting)

Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi dilakukan melalui intervensi yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan

ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi konvergensi stunting sebagai penjabaran Renstra dan Renja. Perangkat Daerah yang terlibat aktif dalam pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) terutama Dinkes (Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan); Dis Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketahanan Pangan dan Produksi Pangan berkelanjutan); DP3AP2KB (Keluarga Sejahtera); Disdikbud (PAUD); Disperkim (Sanitasi); DLH (Sanitasi); Dispermades (Kebijakan Desa); Bappeda dan Litbang 9 Aksi Konvergensi Stunting); DPUPR (infrastruktur, sanitasi); Dinsos (kemiskinan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial); DKP (perikanan); Disperinaker (perindustrian, tenaga kerja); Disdakop UKM (Perdagangan, koperasi, UMKM).

**c. Pengarusutamaan inovasi**

Kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan didesain dengan menerapkan dengan inovasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat mendesain inovasi-inovasi sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang diimplementasikan. Agar inovasi yang ditetapkan memiliki daya ungkit dan dampak pembangunan yang memadai, inovasi didesain melalui pemenuhan instrumen yang sesuai dengan kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi daerah. Kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi didesain sebagai upaya mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

**d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan merupakan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maupun pembangunan berkelanjutan dalam arti yang lebih luas diantaranya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), kependudukan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial. Perspektif pembangunan berkelanjutan mewarnai perencanaan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah yang diturunkan ke dalam Renstra dan Renja.

**e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi**

Kelompok inklusi merupakan anggota masyarakat yang memiliki karakteristik khas dan seringkali berada pada posisi yang marginal dalam pembangunan. Kelompok inklusi ini antara lain difabel, lansia,



pemuda, masyarakat miskin/tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain yang masih marjinal. Dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah didesain dengan perspektif memuliakan kelompok inklusi dalam membuka ruang akses, peran, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

**f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi perspektif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam kebijakan, rencana, program urusan-urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pemukiman rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Integrasi SPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah diterapkan melalui penetapan indikator kinerja SPM sebagai indikator kinerja *outcome* program pembangunan. Komitmen pengarusutamaan SPM diimplementasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di dalam Renstra dan Renja.

**g. Pengarusutamaan Mitigasi Risiko**

Mitigasi risiko pembangunan merupakan salah satu sistem reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Mitigasi risiko pembangunan merupakan tugas melekat pada masing-masing Perangkat Daerah. Dalam melakukan mitigasi risiko dilakukan identifikasi potensi risiko dalam Register Risiko. Register Risiko merupakan identifikasi potensi risiko yang paling mungkin terjadi atau kebijakan rencana program yang memiliki risiko paling tinggi. Dari Register Risiko disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). RTP disusun dengan memperhatikan Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berjumlah 6 (enam) program, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.897.061.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Secara rinci program dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.  
Rincian Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target
I	Program penunjang urusan pemerintah daerah	persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah kecamatan bojong	%	100
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase jumlah dokumen perencanaan. Evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	%	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase jumlah bulan dokumen pengelolaan keuangan disusun	%	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan BMD	%	100
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase jumlah BMD dalam kondisi baik	%	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	IKM Kecamatan bojong	%	91
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan	%	100
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	%	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase desa mandiri kecamatan bojong	%	5.88
		persentase desa maju kecamatan bojong	%	5.88
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase ketersediaan data perkembangan desa	%	100
IV	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan bojong	%	100
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	%	100
2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase jumlah koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan	%	100

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) kecamatan bojong	%	100
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	%	100
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang tertib administrasi kecamatan bojong	%	89
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase jumlah desa tertib administrasi	%	100

Rekapitulasi anggaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Rekapitulasi Anggaran Kegiatan

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.750.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.116.661.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.537.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.140.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.715.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.367.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.840.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	77.300.000
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.700.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.700.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	107.900.000
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.450.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.897.061.000</b>

## **BAB IV. RENCANA KERJA**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 berpedoman pada RKPD dan Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojong.

Adapun program dan kegiatan yang dirancang Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2023 mendasari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Koordinasi Uppaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program-program tersebut di atas dilaksanakan pada Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dengan mendistribusikan ke seluruh komponen organisasi yang terdiri dari sekretariat, seksi pelayanan publik, seksi pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, seksi pemberdayaan masyarakat desa, dan seksi pemerintahan desa. Uraian rencana pelaksanaan program dan pendanaannya

selanjutnya dijabarkan dalam rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah (Kecamatan Bojong) Tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.33 berikut:

Tabel T-C.33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

**KECAMATAN BOJONG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Kecamatan Bojong	100%	1.570.171.000			100%	1.493.689.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu			5.750.000				9.400.000
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojong	5 Dokumen	3.500.000	APBD		5 Dokumen	6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bojong	5 Dokumen	2.250.000	APBD		5 Dokumen	3.400.000
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu</b>			<b>1.116.661.000</b>				<b>1.217.439.000</b>
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Bojong	15 Orang/ Bulan	1.061.701.000	APBD		15 Orang/ Bulan	1.176.239.000
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Bojong	12 Dokumen	54.960.000	APBD		12 Dokumen	41.200.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>			<b>53.537.800</b>				<b>59.027.500</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Bojong	1 Paket	3.002.300	APBD		1 Paket	2.997.000
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumla Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kecamatan Bojong	1 Paket	18.300.000	APBD		1 Paket	18.500.000
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kecamatan Bojong	1 Paket	3.163.000	APBD		1 Paket	6.164.000
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Bojong	1 Paket	9.960.000	APBD		1 Paket	14.399.000
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Bojong	1 Paket	1.641.500	APBD		1 Paket	1.500.000
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Praturan Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Bojong	12 Dokumen	3.000.000	APBD		12 Dokumen	3.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bojong	12 Laporan	14.471.000	APBD		12 Laporan	12.467.500
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)</b>			<b>230.140.000</b>				<b>33.000.000</b>
7.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Prorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kecamatan Bojong	1 unit	30.140.000	APBD		1 unit	33.000.000
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Kecamatan Bojong	0 unit	0	APBD		0 unit	0
7.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantr atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kecamatan Bojong	0 unit	200.000.000	APBD		0 unit	0
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>			<b>102.715.200</b>				<b>104.600.000</b>
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bojong	12 Laporan	660.000	APBD		12 Laporan	560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kecamatan Bojong	12 Laporan	29.791.200	APBD		12 Laporan	31.800.000
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yan disediakan	Kecamatan Bojong	12 Laporan	72.264.000	APBD		12 Laporan	72.240.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>jumlah BMD dalam kondisi baik</b>			<b>61.367.000</b>				<b>70.222.500</b>
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yan dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Bojong	10 unit	49.500.000	APBD		10 unit	49.514.400
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Bojong	20 unit	5.560.000	APBD		1 paket	7.252.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Bojong	3 unit	6.307.000	APBD		1 paket	13.455.200
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>IKM Kecamatan Bojong</b>	<b>Kecamatan Bojong</b>	<b>91%</b>	<b>62.840.000</b>			<b>91%</b>	<b>64.600.000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan</b>			<b>58.840.000</b>				<b>59.600.000</b>
7.01.02.2.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bojong	4 Dokumen	58.840.000	APBD		4 Dokumen	59.600.000
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yg terlaksanakan</b>			<b>4.000.000</b>				<b>5.000.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bojong	3 Laporan	4.000.000	APBD		3 Laporan	5.000.000
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong</b>	<b>Kecamatan Bojong</b>	<b>5,88%</b>	<b>77.300.000</b>			<b>0%</b>	<b>85.500.000</b>
		<b>Persentase desa maju Kecamatan Bojong</b>		<b>5,88%</b>				<b>0%</b>	
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Ketersediaan Data Perkembangan Desa</b>			<b>77.300.000</b>				<b>85.500.000</b>
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bojong	15 Lembaga Kemasyarakatan	18.800.000	APBD		15 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan Bojong	Kecamatan Bojong	1 Dokumen	2.300.000	APBD		1 Dokumen	2.500.000
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bojong	Kecamatan Bojong	11 Laporan	56.200.000	APBD		11 Laporan	63.000.000
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong</b>	<b>Kecamatan Bojong</b>	<b>100</b>	<b>12.400.000</b>			<b>100%</b>	<b>13.000.000</b>
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana</b>			<b>8.700.000</b>				<b>9.000.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojong	2 Laporan	8.700.000	APBD		2 Laporan	9.000.000
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan</b>			<b>3.700.000</b>				<b>4.000.000</b>
7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bojong	1 Laporan	3.700.000	APBD		1 Laporan	4.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong</b>	Kecamatan Bojong	100%	107.900.000	APBD		100%	86.700.000
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum</b>			107.900.000				86.700.000
7.01.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kedaulatan Republik Indonesia	Kecamatan Bojong	240 orang	38.000.000	APBD		240 orang	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kecamatan Bojong	20 orang	3.900.000	APBD		20 orang	3.900.000
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bojong	12 Dokumen	66.000.000	APBD		12 Dokumen	42.800.000
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi Kecamatan Bojong</b>	<b>Kecamatan Bojong</b>	<b>89%</b>	<b>66.450.000</b>			<b>89%</b>	<b>67.750.000</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah desa tertib administrasi</b>			<b>66.450.000</b>				<b>67.750.000</b>
7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojong	4 Dokumen	18.000.000	APBD		4 Dokumen	18.000.000
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bojong	6 Dokumen	14.350.000	APBD		6 Dokumen	14.350.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.06.2.01.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Bojong	1 Dokumen	6.800.000	APBD		1 Dokumen	6.800.000
7.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bojong	1 Dokumen	16.300.000	APBD		1 Dokumen	17.600.000
7.01.06.2.01.08	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Bojong	1 Dokumen	2.200.000	APBD		1 Dokumen	2.200.000
7.01.06.2.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bojong	1 Dokumen	4.500.000	APBD		1 Dokumen	4.500.000
7.01.06.2.01.18	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojong	1 Laporan	4.300.000	APBD		1 Laporan	4.300.000
<b>Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</b>					<b>1.897.061.000</b>				<b>1.811.239.000</b>

## **BAB V. PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholder) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya menyebar sampai ke tingkat bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Bojong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Bojong merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil. Adapaun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi makan akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Renja Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal selain menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Bojong. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2023, Renja menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bojong Tahun Anggaran 2023 yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. RKA tahun anggaran 2023 selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan

berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bojong dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bojong pada Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 menetapkan 6 program dan 13 kegiatan sesuai dengan perubahan Renstra PD Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bojong Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun kedepan. Renja Kecamatan Bojong juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Demikian rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bojong Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu-isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bojong sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Bojong, 2022

CAMAT BOJONG



ENDRO NOR SUSILO, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731018 199303 1 001



# LAMPIRAN

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

KECAMATAN BOJONG

TAHUN 2023

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
6	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
9	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
22	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
25	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojong perlu dioptimalkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
27	Kegiatan Layanan Publik perlu dioptimalkan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan perlu ditingkatkan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
29	Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat terlaksana masih rendah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
30	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada camat masih rendah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
31	Peningkatan desa mandiri dan maju Kecamatan Bojong masih rendah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
32	Ketersediaan data perkembangan desa perlu dimaksimalkan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
33	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa perlu dioptimalkan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
34	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan Bojong masih rendah	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
35	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan masih rendah	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
36	Gangguan trantibum yang dapat di selesaikan Kecamatan Bojong perlu dioptimalkan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
37	Penyuluhan penanggulangan bencana di Kecamatan Bojong masih kurang	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
38	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wiayah Kecamatan maish rendah	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
39	Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan di Kecamatan Bojong masih kurang	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
40	Korrdinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia masih rendah	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
41	Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong perlu dioptimalkan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
42	Pelaksanaan urusan pemerintahan umum Kecamatan Bojong perlu dimaksimalkan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
43	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional perlu dimaksimalkan	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
44	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa masih rendah	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
45	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan perlu diotimalkan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
46	Jumlah desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong perlu ditingkatkan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
47	Ketertiban administrasi desa di Kecamatan Bojong perlu ditingkatkan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
48	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa masih rendah	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
49	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa masih rendah	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

No	Daftar Inventarisasi Masalah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
50	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa masih kurang	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
51	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa masih kurang	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
52	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih kurang	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
53	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa masih rendah	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
54	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan masih kurang	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan